

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan dunia, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dimana masyarakat turut berperan dan berpartisipasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi adalah mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut. Sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Perlu kita sadari bahwa pentingnya penyajian laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan *good government* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis.

Perubahan paradigma tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bila memberdayakan

daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional.

Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing informasi inilah yang akan menjadi alat pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Dalam akuntansi, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*Non Profit Organization*). Oleh karena itu penulis melakukan PKL untuk melihat penerapannya dan menuangkannya dalam laporan PKL dengan judul “Implementasi Akuntansi Asset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010) Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah PKL diatas, maka perumusan permasalahan sebagai berikut : “Apakah Akuntansi Asset Tetap pada

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010)”.

### **1.3 Tujuan PKL**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari PKL ini adalah :

1. Untuk mengetahui Akuntansi Asset Tetap pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi apakah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010).
2. Untuk mengetahui pengelolaan Akuntansi Asset Tetap pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi apakah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010).

### **1.4 Manfaat PKL**

Adapun manfaat PKL ini adalah :

1. Bagi penulis, PKL ini dapat meningkatkan wawasan pengetahuan penulis mengenai Akuntansi Asset Tetap ditinjau dari Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010).
2. Sebagai syarat untuk memenuhi ujian Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

3. Bagi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hasil PKL ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dimasa yang akan datang.

### **1.5 Metode Penulisan Kuliah Kerja Praktek**

Di dalam menulis laporan ini penulis menggambarkan keadaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan PKL untuk mendapatkan data yang sesuai dengan program studi penulis, data yang disusun dijelaskan dan disimpulkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulis kerja praktek ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (*Field Reserch*), yaitu pengumpulan data dengan meneliti data langsung kelapangan yang sebenarnya yang terjadi pada dunia kerja, serta pekerjaan yang berhubungan dengan data yang akan diambil untuk membuat laporan kuliah kerja praktek yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi yaitu :
  - a) Wawancara (*Interview*) yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada bagian-bagian yang mengerti dan memahami tentang materi yang akan dibahas, dengan mengajukan beberapa pertanyaan guna memperoleh jawaban yang tepat untuk menyelesaikan laporan penulis sesuai judul yang dipilih.

- b) Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap semua kegiatan yang berlangsung terutama dalam kegiatan penilaian persediaan.
- 2. Studi Kepustakaan (*Library Reserch*), yaitu dengan maksud untuk menggali teori-teori yang berhubungan dengan penulisan laporan kuliah kerja praktek agar dapat dijadikan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku laporan yang dapat membantu kelancaran mahasiswa dalam menyusun laporan kuliah kerja praktek.

#### **1.6 Tempat Praktek Kerja Magang**

Tempat praktek kerja lapangan (magang) yang saya laksanakan yaitu dikantor Kementreian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan.

#### **1.7 Waktu Praktek Kerja Magang**

Kegiatan pelaksanaan praktek kerja lapangan atau magang di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dimulai pada tanggal 1 Juni 2011-30 Juni 2011, adapun waktu dan hari praktek kerja magang yang diberikan pihak pemerintah yaitu hari senin sampai dengan hari jumat dan mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 sore.